RAPAT KOORDINASI

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI

Senin, 11 Agustus 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No : .....

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT

DARI : MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA
2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA

TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA
Nomor : 500.2.3/4389/SJ

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTUMBUHAN EKONOMI KMA EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH KMA SOSIALISASI SURAT EDARAN BERSAMA KURBUK SEB KURTUP TTG PERCEPATAN PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADA PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL TAHUN 2025 TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR *ONLINE* PD HARI SENIN TGL 11 AGUSTUS 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DGN *MEETING ID* 677 057 3756 *PASSWORD* INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL *YOUTUBE* KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA

BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 KMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTUMBUHAN EKONOMI KMA EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH KMA SOSIALISASI SEB TTG PERCEPATAN PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADA PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL TAHUN 2025 TTK KMA

CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR *ONLINE* BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KMA KOMINFO KMA PERSANDIAN DAN STATISTIK TTK KMA

DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR *ONLINE* BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KMA KOMINFO KMA PERSANDIAN DAN STATISTIK TTK KMA

TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA

EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA

LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI *DRESS CODE* PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA

DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

TANGGAL PEMBUATAN 9 Agustus 2025

Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL

Nama :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal

Tomsi Tohir

No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
	Terima	Kirim		

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi (via zoom)

Hari/Tanggal : Senin / 11-08-2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	SRI LAILAWA	Asistn 2	P	1
2	FADILLURRAHMAN	Bg Eko & SDA	L	2
3				3
4	Indra	Bag Eko SDA		4
5	Juliati	DISDAGPRIN		5
6	Krisman	Diskominfo		6
7	Silawati	inspektorat	P	7
8	ARIRIAH,	Disperkim		8
9	DIAN FUDHA A	BAG. EK&SDA		9
10	FITRYADI	DISDAG PRI		10
11	Arief R.H	BPKAD	L	11
12	Heny B.	Disdagperin	P	12
13	Rahmalina	DKP. 3	P	13
14	Henny Pahriara	DKP. 3		14
15	Noor Effendi	BAPPERIDA	L	15
16	Agus H.	Polres BJB	L	16
17	Ferry A.N	11	L	17
18	RISA A	umum		18
19	Fatimah	- 11 -		19

NOTULEN RAPAT

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4389/SJ Tanggal 9 Agustus 2025

II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025

III. Peserta :
1. Menteri Dalam Negeri
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia

IV. Waktu dan Tempat : Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

V. Hasil :

1. BADAN PANGAN NASIONAL

a) Realisasi penyaluran beras SPHP Beras Juli-Desember 2025 sebesar 1,13% atau 14.914 ton dari total pagu tahun 2025 1,3 juta ton.

b) Peran pemerintah daerah dalam SPHP beras
- Koordinasi Intensif: koordinasi dengan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang perum bulog di penyaluran sphp beras dan bantuan pangan beras.
- Optimalisasi penyaluran: masifkan penyaluran pedagang kios pasar tradisional, GPM dan koperasi KDMP dan outlet/kios pangan binaan pemda.
- Dokumentasi & Pemantauan: dokumentasikan dan penyebaran informasi/berita kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan bersama satgas pangan Polri.

c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
- Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,8 juta ton setara beras
- Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 17 Juli 2025 sebanyak 3,95 juta ton)
- Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 182,5 ribu ton)
- Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
- Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 5.495 kali di 283 kab/kota dan 35 provinsi.
- Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.015 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
- Kios pangan sebanyak 1.404 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 114 kab/kota.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
- Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
- Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
- B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi

- Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar
- Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

a) Pengendalian inflasi untuk mendorong momentum pertumbuhan:
- Efisiensi rantai distribusi logistik pangan
- Perluasan subsidi transportasi pangan
- Konektivitas logistik dan pemanfaatan infrastruktur
- Penguatan ketahanan pangan lokal
- Kerja sama perdagangan antar daerah

b) Tindak lanjut:
- Diversifikasi ekonomi daerah
- Penguatan penciptaan nilai tambah
- Percepatan realisasi belanja daerah
- Pengendalian inflasi secara rutin
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah.

3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

a) Dengan proyeksi peningkatan belanja umat Muslim dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat perdagangan produk halal dan memperluas perannya dalam rantai pasok global. Pertumbuhan konsumsi halal menunjukkan potensi besar bagi perkembangan ekonomi Islam global.

b) Sebesar 3.290 pengeluaran umat Muslim di Indonesia untuk produk halal (diluar sektor keuangan dan media) dan 79,5 atau 2.616 triliun rupiah hanyar dari sektor makanan dan minuman.

c) Upaya strategis untuk mendorong setiap provinsi mengakomodasi arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMD 2025-20230 yaitu menyelaraskan agenda daerah dengan program ekonomi syariah yang mencakup penguatan industri dan UMKM halal, ekspor halal dan dana sosial syariah.

d) Overview nasional sertifikasi halal: lebih dari 65% dari 6,7 juta produk bersertifikasi halal terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencerminkan disparitas antarwilayah dan perlunya akselerasi di luar Jawa.

4. BADAN PUSAT STATISTIK

a) Inflasi bulan ke bulan (Juli 2025 terhadap Juni 2025) sebesar 0,30%, inflasi tahun ke tahun (Juli 2025 terhadap Juli 2024) sebesar 2,37% dan inflasi tahun kalender (Juli 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 1,69%.

b) Dalam empat tahun terakhir, setiap bulan Juli, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalamai inflasi, beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi adalah beras, tomat bawang merah dan cabai rawit.

c) Pada M1 Agustus 2025, tercatat 16 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 16 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.

d) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M1 Agustus 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH.

e) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Wakatobi dengan nilai perubahan IPH 3,54%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan bawang merah.

5. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

a) Pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo memberikan perintah pembentukan CSIRT di setiap instansi Pemerintah. Ini adalah salah satu perintah pertama yang disampaikan Presiden Prabowo pasca pelantikan. Ditargetkan di tahun ini (2025) seluruh instansi Pemerintah sudah memiliki Cyber Security Incident Response Team atau CSIRT baik dari talenta organik organisasi atau dari luar.

b) Upaya yang perlu dilakukan Kepala Daerah:

- Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) paling lambat tanggal 30 September 2025).
- Menyediakan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan persandian.
- Menganggarkan biaya operasional TTIS dalam perencanaan pembangunan daerah APBD
- Melakukan registrasi TTIS paling lambat pada tahun 2029.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembentukan TTIS.
- Melaporkan pelaksanaan surat edara bersama ini secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Bangda dengan tembusan ke BSSN.

6. BULOG

a) Realisasi pengadaan GKP sebesar 3,8 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 727 ribu ton, jadi total pengadaan setara beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 2.850.572 ton.

b) Total realisasi SPHP Juli s.d Desember 2025 sebesar 13.747 ton. Dengan realisasi tertinggi yaitu Prov. Sulsel.

c) Perum Bulog mulai melakukan penyaluran beras SPHP di toko pengecer dan kegiatan Pasar Murah.

d) Total jumlah mitra SPHP sebanyak 5.190 dengan penyaluran terbesar berada di pengecer pasar rakyat. Verifikasi data penyaluran dilakukan setiap hari, dengan cakupan setidaknya 500-1.000 saluran.

7. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

a) Program percepatan Pembangunan 3 (tiga) juta rumah merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi.

b) Dukungan Pemda sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam penyediaan lahan, percepatan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan integrasi program dengan penyerapan tenaga kerja lokal.

c) Peran Kejaksaan diperlukan dalam Pendampingan Hukum, pengawasan dan pencegahan potensi penyimpangan guna memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Rekomendasi dari Jamdatu terhadap Pemerintah Daerah:

- Pemerintah Daerah segera mempercepat regulasi, perizinan dan penyelesaian lahan dengan pendampingan hukum dari Kejaksaan sejak tahap perencanaan, memberikan early warning system dan

memastikan kontrak kerja sama memenuhi unsur kepastian hukum.

- Pemerintah Daerah bersama TPID melakukan monitoring stok dan harga bahan konstruksi strategis dan memastikan transparansi progres pembangunan, mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan program perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah tanpa memicu tekanan inflasi.
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, kelalaian administrasi, dan pelanggaran ketentuan sertifikasi halal atau keamanan siber.

8. KEMENTRIAN PERDAGANGAN

a) Berdasarkan data SP2KP per 8 Agutus 2025, terjadi kenaikan harga beras medium dan premium di sebagian besar wilayah. Tercatat seluruh provinsi berada di atas HET medium, sementara tercatat 36 provinsi berada diatas HET premium.

b) Dukungan peran Pemda guna mendorong perdagangan komoditas antar wilayah:

- Perlunya mapping data dan informasi komoditas (sentra produksi dan kebutuhan masing-masing wilayahnya).
- Mendorong optimalisasi komoditas potensial di wilayahnya.
- Melakukan inisiasi – inovasi dalam mengoptimalkan peran BUMD, Koperasi dan/atau pembinaan terhadap mitra pelaku usaha sebagai off taker.
- Memberikan dukungan alokasi anggaran.
- Pemanfaatan sarana perdagangan dan kolaborasi program Pemerintah guna efisiensi distribusi.
- Menginisiasi kegiatan temu usaha antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi untuk melaksanakan perdagangan komoditas antar wilayah.
- Kerja Sama Perdagangan Komoditas Antar Wilayah perlu diarahkan pada tujuan membantu Pemerintah - Pemda dalam menjaga ketersediaan-pasokan komoditas barang kebutuhan pokok, stabilitas harga, mengurangi disparitas harga serta mendukung pengendalian inflasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi KAD khususnya komitmen pelaku usaha yang terlibat

9. KEMENTRIAN PERTANIAN

a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar

b) Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2,137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya

c) Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.

d) Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.

e) Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri

f) Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.

g) Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor

h) BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera

i) Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

10. KANTOR STAF PRESIDEN

a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 8 Agustus 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Kedelai, Daging Sapi	Cabai Merah Keriting
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Jagung Tk Peternak, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, Cabai Rawit Merah
	Tidak Aman	-	-	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Minyakita

b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 8 Agustus 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	8	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Intan Jaya	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	3	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita
Kab. Mamberamo Raya	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Boven Digoel	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Cabai Merah Keriting, Telur Ayam Ras, Kedelai
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Dogiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Kepulauan Aru	2	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Paniai	2	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Waropen	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

c) Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab dan Kota

- Per Juni 2025, total stok CPPD kab dan kota sebanyak 13.409,42 ton
- Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sementara itu, 6 Provinsi lainnya belum menjalankan kegaiatan tersebut, yaitu Provinsi Maluku, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan DKI Jakarta

- Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kabupaten/Kota belum memiliki CPPD

11. KEMENTRIAN DALAM NEGERI

a) Inflasi Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 186 negara di dunia dan peringkat ke-8 dari 11 negara di ASEAN.

b) Arahan dan penekanan dalam pengendalian inflasi yaitu:
   - Secara konsisten melaksanakan Rapat Koordinasi atau Anev Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI.
   - Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, serta melakukan pengecekan lapangan/pasar
   - Perlu lebih merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Perlu menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Melakukan Rekonsiliasi data, mengintegrasikan data-data baik yang ada di Kementerian Pertanian, Badan Pangan, Bulog, Kementerian Perdagangan maupun di Daerah agar data yang direkonsiliasi betul-betul bisa kita mengintervensi secara tepat.
   - Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT)
   - Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat dalam pengendalian inflasi daerah, berbasis data dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia setempat serta memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan

c) Arahan dan penekanan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:
   - Pemda diminta melakukan pemantauan berkala atas kinerja pertumbuhan ekonomi dengan berkoordinasi bersama BPS dan K/L terkait, serta menyusun strategi mitigasi terhadap risiko perlambatan ekonomi. Langkah korektif harus dilakukan cepat jika terjadi tekanan terhadap indikator ekonomi makro daerah.
   - Pemda harus mendorong kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem OSS (Online Single Submission), menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif, serta melakukan promosi potensi ekonomi daerah kepada investor nasional maupun internasional.
   - Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat sektor produktif melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif lokal, serta memberikan dukungan penuh kepada UMKM melalui pembinaan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pelatihan kewirausahaan.
   - Pemerintah Daerah diminta untuk menyelaraskan program-program peningkatan ekonomi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD, yang fokus pada sektor unggulan daerah, transformasi ekonomi, pengurangan pengangguran, dan peningkatan investasi lokal.
   - Pemda harus fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas antarwilayah, seperti jalan produksi, pelabuhan, pasar rakyat, dan kawasan industri, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi

baru di daerah

12. KEMENTRIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR).

Rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah:

a) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
b) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
c) Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
d) Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
e) Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
f) Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

13. SATGAS PANGAN POLRI

a) Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
   - Melaksanakan rapat koordinasi terkait teknis dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan dan SPHP beras.
   - Pembuatan surat telegram terkait jukrah pengawasan dan pengecekan langsung pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
   - Satgas pangan pusat dan daerah aktif dalam pengawasan pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
   - Selain itu Satgas Pangan Polri juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bantuan pangan dan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga beras yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat.

b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:
   - memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis (beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan) dengan melibatkan K/L terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketepatan sasaran distribusi.
   - Agar Satgasda dan K/L terkait, diharapkan dapat menginisiasi dan melaksanakan kegiatan operasi pasar murah bekerja sama dengan mitra resmi Perum Bulog, Koperasi maupun outlet instansi pemerintah di wilayah masing-masing, guna mendorong percepatan dan pemerataan penyaluran beras SPHP secara masif.
   - Melaksanakan pengawasan ketat terhadp praktik penjualan beras ditingkat produsen, khususnya dalam aspek mutu, takaran dan harga jual, untuk mencegah potensi penyimpangan serta melindungi

kepentingan konsumen dan kestabilan pasar.

14. TENTARA NASIONAL INDONESIA

a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Agustus 2025.
b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM
c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
d) TNI sudah bangun 55 BTP dan kompi produksi
e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-1 Agustus 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar 0,08 (inflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (0,2145), Telur Ayam Ras (0,0971), dan Cabai Rawit (0,0466). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat

DIAN YUDHA ASTUTI, SE
NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (11 Agustus 2025)

Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru